

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peningkatan Ekonomi

##### 1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>11</sup>

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB atau PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak tidak.<sup>12</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu.<sup>13</sup>

Menurut Mankiw yang dikutip oleh Menik Fitriani Safari PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua pendekatan untuk melihat besaran PDB, pertama melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di

---

<sup>11</sup> Sadono, Sukirno. *Makroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm.430.

<sup>12</sup> Arsyad, Lincolyn. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 12.

<sup>13</sup> Iskandar, Putong. *Economics, Pengantar Mikro dan Makro, Edisi Kelima*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) hlm. 411.

dalam perekonomian. Cara lain melihat PDB adalah sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang tercermin dari kenaikan PDB atau PNB dalam jangka panjang tanpa memandang besar atau kecilnya pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi.

## 2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Banyak para ekonom yang mengemukakan teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyelidikan yang telah lama dibahas oleh para ahli ekonomi. Terdapat banyak tokoh beserta pemikiran atau teori mereka mengenai pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sejauh ini. Berikut ialah teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain:<sup>15</sup>

### a. Teori Pertumbuhan Klasik

Dalam sejarah pemikiran ekonomi para penulis ekonomi pada bagian kedua abad ke-18 dan permulaan abad ke-20 lazim digolongkan sebagai kaum Klasik. Kaum Klasik itu sendiri di bedakan atas dua golongan yaitu Klasik dan Neo-Klasik. Tokoh yang termasuk kedalam golongan Klasik diantaranya adalah Adam Smith, David Ricardo Robert Malthus, dan John Stuart Mill.<sup>16</sup> Ahli-ahli ekonomi Klasik dalam

---

<sup>14</sup> Menik Fitriani Safari, *Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia...* hal. 12

<sup>15</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga...*, hlm. 433-437.

<sup>16</sup> Sadono, Sukirno. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 243

menganalisis masalah-masalah pembangunan mempunyai pandangan yang agak berbeda antara satu dengan yang lain.

Pandangan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Tulisan tersebut terutama menganalisis sebab-sebab berkembangnya ekonomi suatu negara. Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan *laissez-faire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat.<sup>17</sup> Mengenai faktor yang menentukan pembangunan, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi dan mengenai corak proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara kumulatif.

Pandangan Ricardo dan Mill bertentangan dengan pandangan Smith mengenai pola proses pembangunan yang sangat optimis, mereka memiliki pandangan yang lebih pesimis tentang akhir dari proses pembangunan dalam jangka panjang. Kedua ahli ekonomi klasik ini berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai *stationary state* yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali.

Menurut pandangan para ekonom klasik terdapat banyak factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat

---

<sup>17</sup> Ibid. hlm. 244.

teknologi.<sup>18</sup> Akan tetapi, dalam teori klasik ini, para ahli ekonomi menempatkan pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi memiliki pandangan bahwa hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang berarti di sini pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara terus-menerus.

Mereka menggambarkan, apabila jumlah penduduk sedikit, dan kekayaan alam relatif berlebihan (banyak), maka tingkat pengembalian modal dari investasi yang dihasilkan tinggi, sehingga di sini para pengusaha akan mendapatkan keuntungan besar, yang akan menciptakan investasi baru, dan pada akhirnya akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, ketika pertumbuhan penduduknya terlalu banyak, maka pertumbuhan penduduk tersebut akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk menjadi negatif, kemakmuran masyarakat menurun, dan tingkat pertumbuhan ekonomi akan rendah.

#### b. Teori Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik, teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran. Mereka menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, dan faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi menurut Solow ialah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan

---

<sup>18</sup> Sadono Sukirno, Makroekonomi: *Teori Pengantar, Edisi Ketiga*,... hlm. 433

kepakaran para tenaga kerja, bukan ditentukan oleh penambahan modal dan penambahan tenaga kerja.

c. Teori Keynes

Jhon Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. Pandangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul: *The General Theory of Employment, Interest and Money* dan diterbitkan pada tahun 1936. Dalam bukunya Keynes berpendapat pengeluaran agregat, yaitu perbelanjaan masyarakat ke atas barang dan jasa, adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara.<sup>19</sup> Selain menerangkan faktor yang menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara dan keadaan yang menciptakan berbagai masalah, analisis makroekonomi juga menjelaskan langkah-langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai sesuatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makroekonomi. Dalam analisis ini ditunjukkan bagaimana pengeluaran agregat dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dalam satu periode tertentu dan pendapatan nasional atau produksi nasional yang tercipta. Dalam suatu perekonomian modern komponen dari pengeluaran agregat dibedakan kepada empat golongan.<sup>20</sup>

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga

---

<sup>19</sup> Sadono, Sukirno. *Makroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga...* hlm. 7

<sup>20</sup> Sadono, Sukirno. *Makroekonomi: Teori Pengantar, Edisi Ketiga...* hlm. 8.

- 2) Investasi perusahaan-perusahaan
- 3) Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah
- 4) Ekspor

### **3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di era modern ini beragam. Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Beberapa factor produksi tersebut terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. Sumber Daya Alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- b. Akumulasi Modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu.
- c. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

Kemajuan Teknologi merupakan yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu untuk meningkatkan produktivitas, modal dan faktor produksi lainnya.

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau

---

<sup>21</sup> Adisasmita, Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*,... hlm. 103-105

PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya.

#### **4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

##### **a. Perubahan Struktur Perekonomian**

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industry akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

##### **b. Pertumbuhan kesempatan kerja**

---

<sup>22</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), hlm. 91.

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya ( pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

c. Tingkat penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik,

air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya.

d. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

## **B. Pekerja**

### **1. Pengertian Pekerja**

Dari pekerja atau buruh dapat ditemukan di dalam ketentuan umum angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pekerja/buruh adalah orang yang bekerja untuk orang

lain dengan mendapat upah pekerja. Sementara itu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja juga memberikan pengertian yang sama dari definisi pekerja/buruh yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.<sup>23</sup>

Menurut seorang pakar hukum perburuhan Imam Soerpomo memberikan batasan mengenai hubungan kerja adalah<sup>24</sup> “Suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan, hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap buruh”. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang berdasarkan suatu perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan yang harus dikerjakan selama pekerja/buruh bekerja, mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dikerjakannya, dan adanya suatu perintah dari pemberi kerja, pengusaha atau majikan.

permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor,

yaitu:

a. Perubahan Tingkat Upah

---

<sup>23</sup> Undang – Undang republik Indonesia No 21 Tahun 2000 tentang ketenagakerjaan

<sup>24</sup> Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20.

Perubahan tingkat upah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi suatu perusahaan, jika diasumsikan bahwa tingkat upah naik, maka dapat terjadi hal berikut:

- 1) Naiknya tingkat upah dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan yang selanjutnya dapat meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Kenaikan harga barang tersebut dapat direspon oleh konsumen dengan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli barang tersebut kembali. Akibatnya banyak produksi yang tidak terjual, produsen terpaksa harus menurunkan jumlah produksinya. Turunnya jumlah produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi.
  - 2) Jika upah naik (dengan asumsi harga hari barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan kebutuhan terhadap barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan substitusi tenaga kerja
- b. Faktor lain – lain.
- 1) Naik turunnya permintaan pasar terhadap hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil

produksi meningkat maka produsen dapat menambah kapasitas produksinya dengan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

- 2) Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual per unit barang turun. Pada keadaan ini produsen meningkatkan produksi barangnya karena permintaan bertambah banyak. Peningkatan permintaan tenaga kerja juga bertambah banyak seiring dengan peningkatan kegiatan perusahaan. Keadaa ini menyebabkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja kearah kanan dikarenakan pengaruh skala produksi (scale effect). Efek selanjutnya yang terjadi bila harga barang-barang modal turun adalah efek substitusi. Keadaan ini terjadi karena produsen cenderung untuk menambah jumlah barang modal (mesin) sehingga terjadi capital intensif dalam proses produksi. Jadi secara relatif penggunaan tenaga kerjanya berkurang.

## **2. Hak dan Kewajiban Pekerja**

Berkaitan dengan hak, maka Pekerja/Buruh mempunyai beberapa hak, antara lain adalah sebagai berikut: <sup>25</sup>

- a. Hak atas pekerjaan Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak azasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

---

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 22.

- b. Hak atas upah yang adil hak ini merupakan hak yang sudah seharusnya diterima oleh pekerja sejak ia melakukan perjanjian kerja dan mengikatkan diri kepada pengusaha (majikan) atau pun kepada suatu perusahaan dan juga dapat dituntut oleh pekerja tersebut dengan alasan aturan hukum yang sudah mengaturnya yaitu pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Hak untuk berserikat dan berkumpul untuk bisa memperjuangkan kepentingan dan hak nya sebagai pekerja/buruh maka ia harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul dengan tujuan memperjuangkan keadilan dalam hak yang harus diterimanya.hal ini dialaskan pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- d. Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Berdasarkan Pasal 86 (1) huruf (a)Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan.

### **C. Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.<sup>26</sup>

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### **1. Hak Pelaku Usaha**

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

### **2. Kewajiban pelaku usaha**

---

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 41.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.08 Tahun 1999 Pasal 6 dan 7 tentang Pelaku Usaha.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau barang yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>28</sup>

### **3. Peran Pelaku Usaha**

- a. Penyedia lapangan pekerjaan

---

<sup>28</sup> Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2008)hlm, 162-163.

Menurut Badan Pusat Statistik lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Secara umum lapangan pekerjaan utama di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sembilan kategori, yaitu: (1) pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri, (4) listrik, gas dan air, (5) konstruksi (6) perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, (7) transportasi, pergudangan dan komunikasi, (8) lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.<sup>29</sup>

Dari masing-masing sektor lapangan pekerjaan itu tentu akan menyerap tenaga kerja. Bagi yang sedikit kreatif tentu tidak hanya memiliki orientasi mencari kerja, namun bisa melihat potensi dan peluang dari berbagai sektor lapangan kerja untuk dijadikan peluang usaha. penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah pendapatan bagi penduduk yang bersangkutan. Kebijakan yang diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja harus dilihat dalam hubungan dengan kebijakan yang menyangkut pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Salah satu kebijakan kesempatan kerja adalah mengadakan identifikasi terperinci, tidak hanya mengenai jumlah angkatan kerja, melainkan juga lokasi dan penggolongan menurut

---

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

lingkungan hidup, persebaran antara daerah, antar sektor, antar kota/pedesaan dan sebagainya. Kebijakan negara dalam lapangan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Bertitik tolek dari kebijakan tersebut maka dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.<sup>30</sup>

Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.<sup>31</sup>

Kesempatan kerja menurut Tambunan adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki (*employment*) dan masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut

---

<sup>30</sup> Nanda Nuraulian, *Analisis Pengaruh Perhotelan Dan Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung*, (Thesis UIN Raden Intan Lampung, 2017)hlm 19.

<sup>31</sup> Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.

adanya kebutuhan berarti adanya kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Besarnya lapangan kerja yang masih lowong atau kebutuhan tenaga kerja yang secara riil dibutuhkan oleh suatu perusahaan tergantung pada banyak faktor, diantaranya yang paling utama adalah prospek usaha atau pertumbuhan output dari perusahaan tersebut, ongkos tenaga kerja atau gaji yang harus dibayar, dan harga faktor-faktor produksi lainnya yang bisa menggantikan fungsi tenaga kerja, misalnya barang modal. Perluasan kesempatan kerja produktif bukan berarti hanya menciptakan lapangan usaha baru. Melainkan pula usaha peningkatan produktivitas kerja yang pada umumnya disertai dengan pemberian upah yang sepadan dengan apa yang telah dipekerjakan oleh setiap pekerja.<sup>32</sup>

Kesempatan kerja merupakan jumlah penggunaan tenaga kerja pada sektor riil yang terdapat di dalam perekonomian. Selain itu terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, yaitu:

- 1) Pengangguran adalah perbedaan diantara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya.
- 2) Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan diantara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen.

---

<sup>32</sup> Tambunan, *Tenaga Kerja*, (Yogyakarta: Bpfe, 2002)hlm 78.

3) Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian.<sup>33</sup>

Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu: (i) jumlah penduduk yang berusia diantara 15 Tahun dan 64 tahun, dan (ii) jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun yang tidak bekerja (contohnya adalah: pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lainnya). Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja, dan penduduk dalam golongan(ii) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dengan jumlah penduduk dalam (ii). Perbandingan diantara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja.<sup>34</sup>

b. Sumber pendapatan

Pendapatan seseorang dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu

---

<sup>33</sup> Subri Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 122.

<sup>34</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm 18.

tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.<sup>35</sup> Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika 2004)hlm 79.

<sup>36</sup> Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 132

Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya<sup>37</sup> Menurut ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency wage*), teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah efisiensi, yang lebih banyak diterapkan dinegara-negara miskin menyatakan upah mempengaruhi nutrisi. Para pekerja yang membayar dengan upah memadai lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktifitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah.<sup>38</sup>

#### c. Sumber Inovasi

Inovasi dapat didefinisikan dengan berbagai macam cara. Beberapa definisi bergantung pada aktivitas yang tercakup dan arti kata baru yang digunakan. Beberapa peneliti telah mencoba untuk mendefinisikan inovasi. Porter and Ketels mendefinisikan inovasi sebagai kesuksesan dalam mengeksploitasi ide-ide baru. Secara garis besar inovasi adalah kapasitas untuk memperkenalkan produk baru dan/atau pemrosesan atau untuk perbaikan diluar produk dan/atau pemrosesan. Cardinal et al menunjukkan bahwa proses inovasi meliputi teknis, fisik, dan aktivitas berbasis pengetahuan yang bersifat terpusat dalam bentuk rutinitas-rutinitas

---

<sup>37</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Kompensasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 22.

<sup>38</sup> Umi Fadilah, *Analisis Besaran Upah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Pekerja Cleaning Service di UIN Raden Intan Lampung), (skripsi uin raden intan lampung, 2017), hlm 40.

pengembangan produk. Herkema mendefinisikan inovasi sebagai pemrosesan pengetahuan yang ditujukan pada penciptaan pengetahuan baru yang sesuai dengan pengembangan solusi-solusi yang dapat dikerjakan dan komersil. Inovasi adalah proses dimana pengetahuan diperoleh, dibagi bersama dan disesuaikan dengan tujuan untuk menciptakan pengetahuan baru, yang berwujud produk-produk dan jasa.<sup>39</sup>

Menurut Suryani, inovasi konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersiapkan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, system struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Teori secara umum menyatakan bahwa kemampuan untuk inovasi adalah kontributor utama untuk menambah keunggulan bersaing dan perbaikan penciptaan nilai, dan karenanya, merupakan salah satu diantara faktor penting yang mempengaruhi kinerja

---

<sup>39</sup> Baroroh Lestari, dkk, *Praktik Manajemen Pengetahuan Dan Kinerja Inovasi Dalam Industri Manufaktur*, (Malang: UB Press, 2013)hlm 83.

<sup>40</sup> Simon Sumanjyo Hutagalung dan Dedy Hermawan, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)hlm 23.

organisasi. Menghasilkan inovasi yang sukses adalah tugas yang sulit dan kompleks.<sup>41</sup>

Menurut Harvard Business Essentials terdapat enam sumber ide inovasi yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Pengetahuan baru (*new knowledge*) misalnya perkembangan sains dan teknologi.
- 2) Saran dan ide konsumen (*tapping the ideas of customer*).
- 3) Pengguna utama (*lead user*) yaitu perusahaan dan individu, konsumen dan non-konsumen pengguna utama yang memiliki kebutuhan untuk sesuai dengan bidangnya.
- 4) Desain yang memahami konsumen (*emphatic design*) ide inovasi diperoleh melalui pengamatan terhadap penggunaan barang dan mengidentifikasi kebutuhan yang belum ditemukan pengguna.
- 5) Penemuan (*invention vactories*) ide inovasi diperoleh dengan melakukan penelitian formal dan pengembangan.
- 6) Skunkworks, ide inovasi diperoleh dengan memperkerjakan orang berbakat yang memiliki perbedaan pandangan dengan organisasi dalam pemecahan masalah.

Kemudian untuk melaksanakan inovasi yang baik dan terarah menurut Drucker membahas prinsip-prinsip inovasi menjadi petunjuk apa yang harus dilakukan, hal-hal yang harus dilakukan

---

<sup>41</sup> Baroroh Lestari, dkk, *Praktik Manajemen.....*hlm 84

<sup>42</sup> Andi Sri Wahyuni, *Inovasi Dalam Pelayanan Publik Sektor Jasa PT PLN Kabupaten Kepulauan Selayar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016)hlm 30.

dan tiga persyaratan dalam melakukan inovasi. Hal-hal yang harus dilakukan dalam berinovasi adalah:

- 1) Inovasi yang terarah adalah sistematis. Inovasi yang terarah mempertimbangkan area yang berbeda, sumber-sumber yang berbeda, kepentingan yang berbeda dan waktu yang berbeda. Inovasi yang sistematis diawali dengan analisis peluang dan langkah-langkah dari sederhana ke kompleks.
- 2) Inovasi meliputi hal yang konseptual maupun perceptual. Konseptual meliputi konsep perubahan terbaik bagi organisasi, percepatan meliputi hasil evaluasi perusahaan, analisis sumber daya internal, pelanggan dan pengguna, agar pelaku inovasi dapat mengetahui kepuasan, peluang, harapan, nilai dan kebutuhan. Inovasi harus efektif, sederhana dan terfokus. Inovasi yang efektif dimulai dari hal yang kecil.

#### **D. Ayam Ras Petelur**

Peternakan adalah tempat ternak untuk tinggal dan berproduksi sesuai dengan teknik tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>43</sup> Peternakan dapat diartikan sebagai kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.<sup>44</sup> Secara umum peternakan dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan

---

<sup>43</sup> Wikipedia . <https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan> diakses pada 17 oktober 2021

<sup>44</sup> Muhammad Rasyaf, *Berternak Ayam Petelur*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), hlm.

jenis hewan yang dipelihara yaitu peternakan hewan besar, kecil dan unggas.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam adalah serangkaian kegiatan usaha dalam bidang agraris terutama peternakan yang dilakukan perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak unggas berupa ayam pedaging atau petelur yaitu kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan unggas berupa ayam ras untuk diambil manfaat dan hasil dari peternakan tersebut.

#### 1. Syarat peternakan

Peternakan merupakan suatu usaha agribisnis tentunya harus mempunyai tujuan yang berguna sebagai evaluasi kegiatan yang dilakukan selama beternak salah atau benar serta sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan yang optimal bagi pemilik peternakan. Tujuan usaha beternak ayam tersebut dapat berupa:

- a. Peternakan komersial dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maka segala prinsip ekonomi perusahaan, ekonomi mikro dan makro, konsep akuntansi dan manajemen harus diterapkan.
- b. Mengisi waktu luang untuk memperoleh nilai manfaat.
- c. atau peternakan dibuka untuk tujuan pemanfaatan sumberdaya misalnya tanah, modal dan keahlian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Daniel, *Pengantar Ilmu Ekonomi Peternakan*, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2002), hlm.121

<sup>46</sup> Muhammad Rasyaf, *Beternak Ayam Petelur*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2007), hlm. 14.

Tujuan utama memang bukan merupakan aspek komersial namun harus tetap mengharapkan modal yang ditanam dapat kembali.<sup>47</sup> Peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Sedangkan tujuan pemeliharaan berkaitan dengan kesungguhan apabila dalam berternak tidak dilandasi dengan rasa sungguh-sungguh maka akan mengakibatkan kegagalan. didalam mendirikan usaha peternakan tentunya harus memperhatikan standar kelayakan dalam mendirikan usaha tersebut sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Standar kelayakan dalam mendirikan usaha tersebut berkaitan dengan syarat pendirian kandang usaha peternakan, syarat tersebut antara lain:

a. Menentukan lokasi peternakan

Syarat-syarat untuk menentukan lokasi usaha budidaya ayam ras petelur dan pedaging adalah jarak dengan pemukiman penduduk, jarak dengan tempat pemasaran, akses jalan, lahan, sumber air, dan kondisi lingkungan masyarakat sekitar.<sup>48</sup> Jarak antara pemukiman dengan kandang peternakan ayam minimal 500M agar tidak menimbulkan pencemaran udara, air, bau, dan kotoran.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Wikipedia. <http://id.m.wikipedia/wiki/Peternakan> Diakses pada 17 Oktober 2021

<sup>48</sup> Roni Fadilah dan Fathuroji, *Memaksimalkan Produksi Ayam Ras Petelur*, ( Jakarta : Pt Agromedia Pustaka, 2013), hlm. 20

<sup>49</sup> Tri Yuwanta, *Dasar Ternak Unggas*, (Yogyakarta: Kencana,2004), hlm 18

b. Mengajukan perizinan

Setiap usaha budidaya peternakan ayam baik pembibitan maupun komersial, petelur maupun pedaging, harus memiliki izin usaha. tahapan proses perizinan dimulai dari surat perizinan lingkungan masyarakat sekitar, rekomendasi dari desa, izin prinsip dari pemerintah, izin mendirikan bangunan dan AMDAL, serta surat izin usaha. Terkait dengan masalah prosedur pemilihan lokasi usaha peternakan dan perizinan pendirian badan usaha, calon peternak dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.<sup>50</sup>

c. Membangun kandang yang ideal

Kandang merupakan sarana terpenting untuk terselenggaranya usaha peternakan ayam. Pada prinsipnya, kandang mempunyai fungsi pokok yaitu memberikan rasa nyaman dan aman untuk ayam maupun pekerja. Kandang yang nyaman dapat melindungi ayam dari segala macam faktor stres, seperti terlindung dari sinar matahari, hujan, udara dingin, angin dan debu.<sup>51</sup>

Lokasi peternakan sebagai tempat kegiatan proses industri peternakan harus sesuai dengan kehidupan ayam, lokasi yang tidak cocok dengan kehidupan ayam dapat menyebabkan produksi (daging dan telur) rendah walaupun ayam yang ditenakan adalah ayam unggul

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Roni Fadilah dan Fathuroji, Memaksimalkan Produksi Ayam Ras Petelur..., hlm. 26

oleh karena itu, penentuan lokasi sangatlah penting. Penentuan lokasi peternakan harus ditentukan oleh 4 aspek:

a. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah faktor lingkungan hidup yang akan mempengaruhi dan mendukung kehidupan ternak dalam memproduksi. Lokasi dan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan produktivitas ayam harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ketinggian tempat, Lokasi terbuka dan cukup luas, Lokasi tenang, Lokasi memiliki sumber air, Lokasi lebih tinggi dari sekitarnya.

b. Faktor sosial dan ekonomi

Faktor sosial dan ekonomi yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi antara lain lokasi perkandangan yang jauh dari pemukiman. Bau limbah yang berupa kotoran ayam yang sangat menyengat dan debu kandang yang bertebaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat disekitarnya. Pembangunan peternakan dapat memberi pekerjaan dan peningkatan pendapatan bagi penduduk disekitarnya.

c. Aspek hukum

Aspek hukum yang perlu mendapat perhatian terkait dengan pemilihan lokasi peternakan adalah masalah pendirian badan usaha dan penggunaan tanah diwilayah setempat. Izin pendirian badan usaha diperlukan untuk memperkuat status kepemilikan usaha dan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang diwilayah

setempat.<sup>52</sup> Izin pendirian badan usaha tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paragraf ke-7 tentang perizinan pasal 36 ayat (1) bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan<sup>53</sup>

d. Dampak lingkungan

Dampak lingkungan bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup.<sup>54</sup> Ketentuan setiap usaha harus memiliki Amdal tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paragraf ke-5 tentang Amdal pasal 22 ayat (1) bahwa setiap usaha dan/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.<sup>55</sup>

e. Lingkungan peternakan ayam

Lingkungan peternakan ayam merupakan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha dan kehidupan ayam,

---

<sup>52</sup> Budi Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras Petelur dan Pedaging*, (Jakarta: Pustaka Mina, 2012), hlm,20

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>54</sup> Budi Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras Petelur dan Pedaging*,..., hlm. 26

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

lingkungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan abiotik dan biotik.

f. Lingkungan abiotic

Secara umum lingkungan abiotik peternakan adalah semua unsur lingkungan yang tidak bernyawa yang bersifat fisik, kimia, dan sosial dari ternak dan terdapat disekitar tempat ternak tersebut hidup dengan segala bentuk aktivitas kehidupannya. Contoh unsur abiotik yaitu lahan, air, kandang dan sosial budaya.

g. Lingkungan biotik

Adalah semua unsur hayati yang terdapat disekitar ternak. Misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan lainnya Seperti halnya lingkungan abiotik lingkungan biotik juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kelangsungan suatu usaha peternakan.

## **E. Penelitian terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Chairil M. Noor dan Gartika Rahmasari (2018), dalam penelitian yang berjudul<sup>56</sup>, “*Esensi Perencanaan Bisnis yang Memadai Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seedemikian penting keberadaan UMKM dalam membangun kehidupan ekonomi masyarakat sehingga perlu penanganan yang baik dilihat dari aspek perumusan perencanaan usaha yang memadai bagi UMKM. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sudah saatnya UMKM dikelola secara professional termasuk dalam penyusunan perencanaan bisnisnya. Rencana bisnis menggambarkan

---

<sup>56</sup> Chairil M. Noor dan Gartika Rahmasari, *Esensi Perencanaan Bisnis yang Memadai Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal ABDIMAS BSI, Vol. 1 No. 3 Agustus 2018

rencana pengembangan dan kegiatan usaha UMKM dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, yang mencakup rencana dalam jangka pendek, jangka menengah, dan rencana strategi pengembangan jangka panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Lanang Prastika, dkk (2016), dalam penelitian yang berjudul, "*Penerapan Konsep Pengorganisasian dan Pengarahan pada PT Bayus Cargo Badung Bali*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi penerapan konsep pengorganisasian dan pengarahan dengan pendekatan metode brainstorming dan fishbone diagram pada PT Bayus Cargo. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan konsep pengorganisasian dan pengarahan pada PT Bayus Cargo belum mencerminkan adanya penerapan konsep yang efektif, efisien, dan produktif. Ini mengidentifikasi perlu adanya perbaikan-perbaikan secara internal dalam berbagai segi termasuk di dalam struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, komunikasi dan rentang kendali, dan lain-lain.<sup>57</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Faizin (2015), dalam penelitian yang berjudul, "*Manajemen Pengelolaan Bisnis Di Panti Asuhan Darul Hadlonah Demak*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan bisnis di panti asuhan Darul Hadlonah Demak dan apa saja faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat jalannya bisnis. Dari hasil penelitian di dapat bahwa tahap-tahap pelaksanaan

---

<sup>57</sup> I Wayan Lanang Prastika dkk, *Penerapan Konsep Pengorganisasian dan Pengarahan Pada PT Bayus Cargo Badung, Bali, Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 12 No. 3 Nopember 2016

manajemen bisnis dapat berjalan dengan baik karena sebelum menentukan bentuk bisnis menganalisis terlebih dahulu. Setelah itu menggunakan fungsi manajemen yang paling sederhana meliputi empat tahap yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan secara langsung oleh manajer panti asuhan. Faktor pendukung jalannya bisnis di Panti Asuhan Darul Hadlonah Demak karena adanya modal, tenaga kerja, alat transportasi, marketing/pemasaran, teknologi, pemerintah, adanya dukungan masyarakat, kondisi alam, kondisi perekonomian dan jaringan.<sup>58</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Syaakir Sofyan (2017), dalam penelitian yang berjudul, “*Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran UMKM dalam perekonomian. Dari hasil penelitian tersebut di dapat bahwa UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM mampu mengatasi beberapa permasalahan ekonomi negara dengan menghasilkan barang/jasa yang dihasilkan yang diperuntukkan kepada masyarakat, mengatasi masalah pengangguran, dan mampu menciptakan lapangan kerja. Posisi UMKM yang sangat strategis perlu diperkuat dengan dukungan pemerintah dan perbankan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM.<sup>59</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2012), dalam penelitian yang berjudul, “*Peran Entrepreneurship Dalam Mendorong Pertumbuhan*

---

<sup>58</sup> Faizin, *Manajemen Pengelolaan Bisnis Di Panti Asuhan Darul Hadlonah Demak*, (Skripsi Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2015).

<sup>59</sup> Syaakir Sofyan, *Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia*, Bilancia, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

*Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dari kewirausahaan baik di Indonesia maupun di Negara lain dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut di dapat bahwa Entrepreneur memiliki peran penting dalam kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Entrepreneur menciptakan inovasi proses produksi serta berani mengambil risiko dalam melakukan usaha. Dengan kemampuan melakukan inovasi-inovasi dan keberanian menerapkan inovasi dalam perusahaan, entrepreneur mampu mendirikan perusahaan. Usaha baru yang dibangun akan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi jumlah entrepreneur maka akan tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

penelitian yang dilakukan oleh Ngadiono dan Kirwani Penelitian ini meneliti tentang *Peran Koperasi Agribisnis Dana Mulya sebagai penampung hasil produksi susu sapi di Pacet - Mojokerto*.<sup>60</sup>Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada penurunan produksi susu sapi di Pacet-Mojokerto dan juga manfaat koperasi Agribisnis Dana Mulya bagi anggota. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi peran Koperasi Agribisnis Dana Mulya sebagai penampung hasil produksi susu sapi di Pacet-Mojokerto.Serta untuk mengidentifikasi manfaat koperasi agribisnis dana mulya bagi anggota. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimulai dengan reduksi

---

<sup>60</sup> Ngadiono dan Kirwani, *Peran Koperasi Agribisnis Dana Mulya sebagai penampung hasil produksi susu sapi di Pacet – Mojokerto* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya 2013)

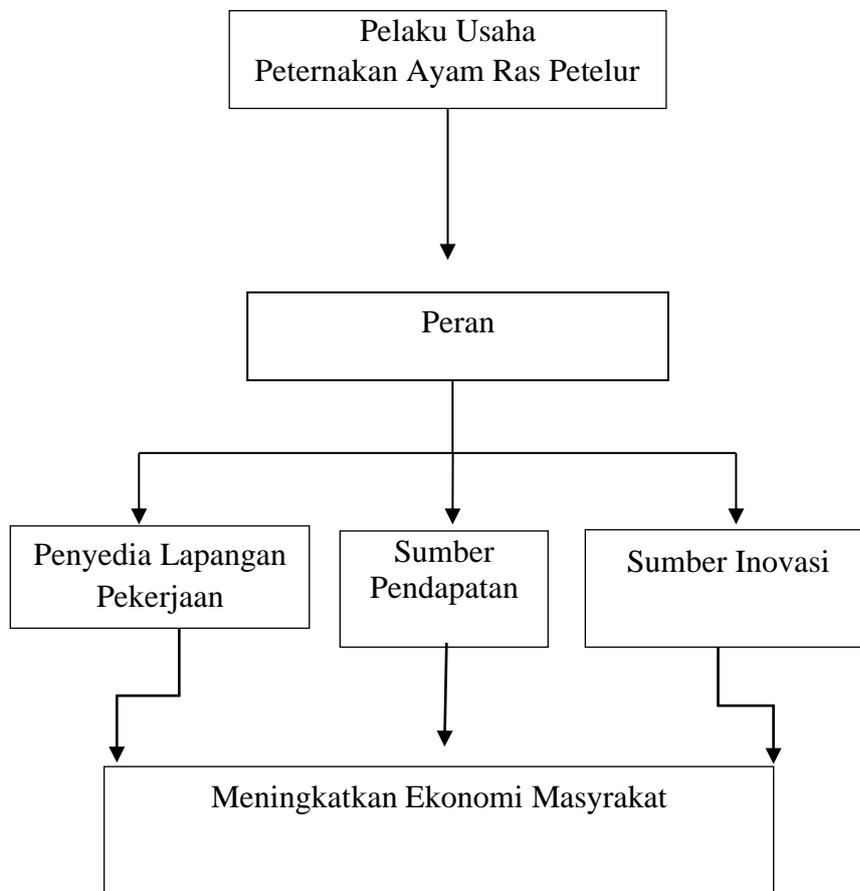
data, kategorisasi, serta sintesisasi Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, ketika peneliti menanyakan kepada informan mengenai seberapa penting keberadaan koperasi bagi koperasi dan anggota, di dapatkan suatu jawaban yang di dapatkan dari informan bahwa Koperasi Agribisnis Dana Mulya berfungsi sebagai penampung hasil susu sapi yang dihasilkan dari para anggota maupun non anggota. Tanpa adanya koperasi anggota akan mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil susu sapi. Sehingga dengan keberadaan Koperasi Agribisnis Dana Mulya sangat membantu perekonomian mereka yang mayoritas hanya bekerja sebagai peternak sapi perah. Dengan adanya Koperasi Agribisnis Dana Mulya sangat membantu untuk menyejahterakan para anggota. Hal ini juga di buktikan dengan penjualan pakan ternak khususnya ternak sapi berupa kebutuhan nutrisi serta vitamin bagi hewa ternak kepada para anggotadengan harga yang relatif murah.

Penelitian yang dilakukan oleh Renica Selvia, (2016), dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Eksternalitas PT. Phillips Seafood Indonesia Lampung Plant Terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak eksternalitas dari keberadaan PT. Philips Seafood Indonesia Bandar Lampung Plant terhadap kondisi social ekonomi masyarakat di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Dari hasil penelitian adanya tenanga kerja yang terserap terkait keberadaan PT. Philips Indonesia Lampung Plant, meningkatnya pendapatan masyarakat secara umum, berkembangnya struktur ekonomi

yaitu adanya peluang usaha seperti warung makan, toko klontongan, rumah/kos-kosan. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PT. Philips Seafood Indonesia Lampung Plant adalah pencemaran lingkungan, rusaknya infrastruktur jalan serta Kesehatan masyarakat menurun akibat lingkungan yang tercemar. Perbedaan dari penelitian saya terletak pada metode dan sumber data yang diambil.

## F. Kerangka Konseptual

**Bagan 2.1 Keraangka Konseptual**



Berdasarkan Bagan 2.1 penelitian ini difokuskan pada pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur dan peran pelaku usaha peternakan ayam ras petelur dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Suksewu. Pengelolaan usaha

dilakukan pelaku usaha berdasarkan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Kepemimpinan), dan Controlling (Pengendalian). Serta beberapa peran dari pelaku usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.